



## PELAYANAN TRANSFORTASI LAUT DI PULAU BELAKANG PADANG KOTA BATAM SEBAGAI PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE

Edi Indera<sup>1</sup>, Alberth R Reinold Palit<sup>2</sup>, Teguh Eko Raharjo<sup>3</sup>, Hari Dewi Purwasih<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Batam

<sup>3,4</sup>Program Magister Perencanaan Wilayah, Fakultas Teknik, Universitas Batam

Email: [edi.inder@univbatam.ac.id](mailto:edi.inder@univbatam.ac.id)<sup>1</sup>, [reinoldpalit88@gmail.com](mailto:reinoldpalit88@gmail.com)<sup>2</sup>, [deguher@gmail.com](mailto:deguher@gmail.com)<sup>3</sup>

[hariidewii@gmail.com](mailto:hariidewii@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu sarana yang dapat menjadi media penghubung antar manusia dengan tempat tujuan tertentu. Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari – hari, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun dalam melakukan interaksi antar manusia. Untuk mencapai kenyamanan, keamanan dalam beraktivitas, dibutuhkan sistem transportasi yang aman ramah dan bermartabat. Karena sistem transportasi merupakan aspek yang paling penting dalam menjalankan perekonomian maka harus dikelola dengan baik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Belakang Padang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan serta karakteristik transportasi laut di Pulau Belakang Padang Kota Batam dalam kerangka *Governance*, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang Padang berjalan lancar karena adanya peran Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak swasta atau koperasi masyarakat seperti Penyediaan transportasi laut dimana masyarakat Pulau Belakang Padang sebagai pengguna jasa transportasi laut tersebut. Jika dilihat dari prinsip *good governance* responsivitas pemerintahnya memang sudah ada pengawasan dari pihak pemerintah tetapi sarana transportasi yang dimiliki pihak swasta juga belum efektif dan efisien untuk dijadikan sarana transportasi yang layak bagi masyarakat Pulau Belakang Padang.

**Kata Kunci :** *Transportasi, Good Governance, Belakang Padang*

### ABSTRACT

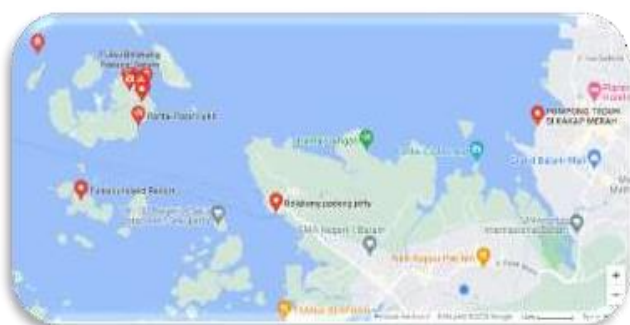
*Transportation is one of the medium that can be a link between humans and certain destinations. Transportation makes it easy for humans to carry out their daily activities, both in meeting the needs of life and in interacting between people. To achieve comfort, security in activities, a safe, friendly and dignified transportation system is needed. Because the transportation system is the most important aspect of running the economy, it must be managed properly. The location of this research was conducted on Pulau Belakang Padang with the aim of knowing how the services and characteristics of sea transportation on Pulau Belakang Padang Batam City within the framework of governance. with private parties or community cooperatives such as the provision of sea transportation where the people of Pulau Rear Padang are users of these sea transportation services. If seen from the principle of good governance, the government's responsiveness is indeed under supervision from the government, but the transportation facilities owned by the private sector are also not yet effective and efficient to be used as a proper means of transportation for the people of Pulau Belakang Padang.*

**Keywords:** *Transportation, Good Governance, Belakang Padang*

## I. PENDAHULUAN

Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan. Transportasi laut merupakan salah satu urat nadi dalam menunjang keberhasilan perekonomian Indonesia. Jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian nasional juga terganggu. Sistem transportasi di Pulau Belakang Padang sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya alam yang dapat mendukung erjadinya perkembangan perekonomian masyarakat di Pulau Belakang Padang. Pertumbuhan ekonomi di daerah Pulau Belakang Padang menyebabkan peningkatan kuantitas serta kualitas tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu (Gunawan, 2008:26). Seiring berjalannya waktu perahu sebagai transportasi masyarakat Pulau Belakang Padang sudah digantikan dengan speed boat atau lebih akrab dipanggil Boat Pancung.

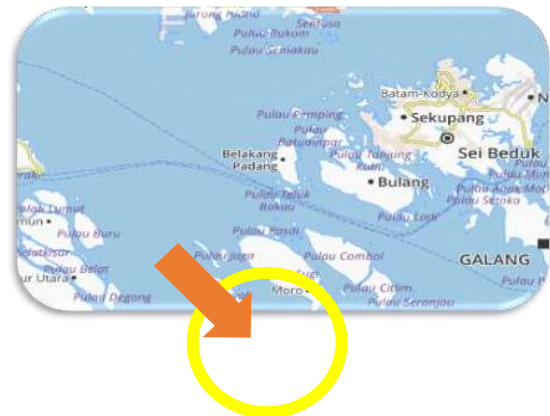
Boat Pancung merupakan sarana transportasi laut yang masih diandalkan oleh masyarakat Pulau Belakang Padang dalam melakukan aktivitas perekonomian sehari-hari. Boat pancung yang berbahan bakar solar ini mampu untuk mengangkut 10 - 12 orang penumpang dan merupakan sarana transportasi yang lebih efektif dibanding perahu. Boat Pancung menggunakan tenaga mesin dan mampu menghemat waktu perjalanan dalam mendukung arus perekonomian masyarakat Pulau Belakang Padang.



Gambar 1: Lokasi Pulau

Dalam rangka pengembangan pariwisata di Pulau Belakang Padang, Pemkot Batam berencana meningkatkan moda transportasi laut, membangun infrastruktur lingkaran pulau, dan meningkatkan estetika wilayah, dalam usaha untuk mewujudkan

kesejahteraan warga negara yang merupakan tujuan dari pendirian sebuah pemerintahan, dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dibutuhkan kerjasama dan interaksi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. *Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui intraksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.



Gambar 2: Peta Pulau Belakang Padang

Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat dan dermaga. Hal ini menuntut penyedia jasa transportasi, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga memberikan kepuasan, kenyamanan, dan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi tersebut.

Pulau Belakang Padang merupakan pulau yang terletak di Kota Batam Kecamatan Belakang Padang, Jumlah penduduk kecamatan ini pada tahun 2019 sebanyak 42.943 jiwa, dengan kepadatan penduduk 506 jiwa/km<sup>2</sup>. memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.778 kepala keluarga dengan mata pencarian penduduknya nelayan, dan berwiraswasta. Pulau tersebut merupakan pulau yang menjadi bagian yang ada dari Kota Batam, transportasi laut sangat menunjang aktivitas masyarakat Pulau Belakang Padang seperti dalam bidang bisnis, perekonomian dan bidang pendidikan.

Pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang Padang juga ada interaksi dari pemerintah Daerah yaitu dinas perhubungan Kota Batam yang memberikan alat-alat keselamatan berupa pelampung keselamatan, karena penumpang

transportasi tersebut dominan adalah siswa yang bersekolah di seberang dan para pekerja yang bekerja di Batam Namun transportasi laut di Pulau Belakang Padang dikategorikan masih kurang layak karena ukuran dan kondisinya yang tidak sebanding dengan banyaknya penumpang, sehingga selalu terjadi kepenuhan penumpang, ditambah dengan kurangnya alat alat keselamatan sertabelum adanya asuransi keselamatan bagi penumpang.



Gambar 3: Transportasi kapal Pompong/Pancung Belakang Padang

Keamanan selama diatas boat pancung dan kapasitas boat menyebabkan keresahan hati penumpang dan orang tua yang anak-anaknya bersekolah di seberang, ditambah lagi belum adanya asuransi jiwa dari pemerintah maupun swasta untuk menjamin keselamatan siswa yang menyeberang. Apalagi pada musim angin kencang sehingga menimbulkan ombak besar dilaut. Adapun musim angin kencang yang harus di hadapi penumpang yaitu :

1. Angin utara, bulan januari dan februari
2. Angin selatan, bulan juni, agustus, dan september
3. Angin barat, bulan oktober, november, dan desember

Transportasi laut di Pulau Belakang Padang dianggap masih kurang layak karena alasan sebagai berikut :

1. Ukuran dan kondisi kapal yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penumpang
2. Kurangnya alat pengaman atau pelampung
3. Belum adanya asuransi keselamatan penumpang

#### 4: Perahu Pompong/Boat Pancung

Harapan masyarakat dalam mencapai tujuan pelayanan dan good governance, pemerintah seharusnya merespon masalah ini, karena transportasi merupakan salah satu bidang yang ada dalam pelayanan publik. yang harus dilayani pemerintah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Transportasi merupakan sarana sangat penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di daerah Pulau Belakang Padang menyebabkan peningkatan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu (Gunawan, 2008:26).

Dari observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa hampir semua masyarakat di Pulau Belakang Padang yang bekerja di Batam, para pekerja ini lebih memilih untuk pulang-pergi ke rumah mereka di Pulau Belakang Padang dibandingkan menyewa kos atau rumah. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai langganan penyedia transportasi boat pancung dengan sistem pembayaran per bulan yang lebih hemat sehingga mereka lebih merasa nyaman untuk pergi atau pulang kerja. Keberadaan Boat Pancung sebagai transportasi di Pulau Belakang Padang juga mempermudah arus barang dan jasa. Berdasarkan laporan kependudukan dari kelurahan pada Maret 2019 tercatat bahwa jumlah populasi masyarakat Pulau Belakang Padang sekitar 46.833 jiwa. Jumlah penduduk yang banyak ini sudah pastinya membutuhkan ketersediaan pangan baik itu makanan ataupun obat-obatan. Jika masing-masing keluarga membeli langsung kebutuhan pangan mereka langsung ke Batam, maka ini akan membuat perputaran arus kas keluarga tersebut menjadi tidak stabil. Melihat peluang ini maka para pelaku

wirausaha berlomba-lomba untuk mendirikan toko-toko penyedia pangan dan produk-produk kebutuhan masyarakat lainya dalam mendukung arus barang dan jasa disediakan dari Batam oleh para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Belakang Padang.



Gambar 5. Penumpang boat pancung

Pada saat distribusi barang dan jasa inilah kegunaan boat pancung amat sangat dibutuhkan, karena kelebihan Boat Pancung ini mampu mengangkut hingga 700 kg barang-barang pangan dan mempermudah pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka inginkan. Selain itu juga kemudahan arus barang dan jasa yang disebabkan oleh boat pancung ini dapat menambah pertumbuhan perekonomian para pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.

### 1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, berkaitan dengan perencanaan pengembangan pariwisata, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sarana dan pra-sarana transportasi laut Belakang Padang sehingga mendukung potensi wisata di Pulau Belakang Padang.
2. Untuk mengetahui konsep dan strategi perencanaan untuk dalam mengembangkan transportasi di Pulau Belakang Padang dengan prinsip *good governance*.

### 1.2. Manfaat Penelitian :

1. Dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan pengembangan Transfortasi laut di Pulau Belakang Padang.
2. Sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai promosi

wilayah pariwisata di Pulau belakang Padang untuk peningkatan sumber daya manusia.

### 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan transportasi laut di Belakang Padang yang dapat meningkatkan potensi wisata di Pulau Belakang Padang Batam Kepulauan Riau.
2. Bagaimana potensi transportasi laut yang didukung dengan *good governance* di Belakang Padang sehingga dapat mendukung pengembangan wisata di kecamatan Belakang Padang Kepulauan Riau”.

### 1.4 Batasan Masalah

Untuk lebih berfokus dan mempermudah penyelesaian masalah dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Cakupan wilayah pada penelitian ini yaitu transportasi laut di Pulau Belakang Padang.
2. Cakupan potensi wisata yang dapat dijangkau oleh transportasi laut di Pulau Belakang Padang.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Kriteria Transportasi Publik

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus memenuhi kriteria pelayanan publik. Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Ketentuan pertama adalah kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang yang menggunakan jasa transportasi. Penumpang akan merasa nyaman di dalam sarana transportasi bila di sarana tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, salah satunya adalah proses yang dijalani calon penumpang sebelum dan setelah berada dalam sarana transportasi. Ketentuan kedua adalah keamanan, yaitu aspek rasa aman yang dirasakan oleh penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya

adalah sistem tertutup dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan penumpang. Selain itu, adalah sistem naik dan turun penumpang. Untuk menjaga keamanan, penumpang harus naik dan turun hanya pada pelabuhan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem tertutup ini dapat memberikan rasa aman bagi penumpang dari ancaman pencurian, pencopetan, perampokan, atau insiden insiden lainnya yang mengancam keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa transportasi. Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan terpenuhinya waktu sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan atau tepat. Ketentuan ini hanya dapat terpenuhi bila sarana transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus. Sarana transportasi ini, walaupun belum sempurna yang diharapkan pada ketigaketentuan di atas, namun telah memenuhi harapan masyarakat ibu kota dalam mendapatkan pelayanan transportasi publik yang cepat, nyaman dan aman.

## .2 LANDASAN TEORITIS

Peran dan Manfaat Transportasi Menurut Tamin (1997:5), prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dengan melihat dua Analisis faktor peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadipenting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang . Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi penting dari sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena perlunya transportasi guna mendukung kedua peran yang disampaikan di atas sehingga akan memudahkan aksesibilitas orang dan barang. Dalam pendekatan transportasi, menurut Black (1981) aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna

wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”-nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Pernyataan “mudah” atau “susah” merupakan pernyataan yang sifatnya sangat “subyektif” dan “kualitatif”, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang mudah dan susah terhadap aksesibilitas yang mereka rasakan. Tamin (1997:52) mengungkapkan bahwa aksesibilitas dapat pula dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lain, maka dapat dikatakan memiliki aksesibilitas yang tinggi, demikian sebaliknya. Jadi suatu wilayah yang berbeda pasti memiliki aksesibilitas yang berbeda, karena aktivitas wilayah tersebut tersebar dalam sebuah ruang yang tidak merata. Akan tetapi sebuah lahan yang diperuntukan untuk bandar udara memiliki lokasi yang tidak sembarangan, sehingga lokasinya pun sangat jauh dari kota karena harus memperhatikan segi keamanan, pengembangan wilayah, dan lainnya. Aksesibilitas menuju bandara menjadi rendah karena lokasinya yang sangat jauh dari pusat kota, namun dapat diatasi dengan menyediakan sistem jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi. Artinya, saat ini ukuran aksesibilitas yang diukur berdasarkan jarak sudah tidak lagi digunakan, namun dapat diukur berdasarkan waktu tempuh

Menurut Soesilo (1997) transportasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan suatu kota atau daerah. Beberapa manfaat yang dapat disampaikan adalah:

- Penghematan biaya operasi

Penghematan ini akan sangat dirasakan bagi perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan. Penghematan timbul karena bertambah baiknya keadaan sarana angkutan dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraanya dan kondisi sarananya. Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan untuk operasi kendaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan,
- 2) Penggunaan pelumas;
- 3) Pemeliharaan suku cadang;

- 4) Penyusutan dan bunga;
- 5) Waktu tekong dan waktu penumpang.

- Penghematan waktu

Manfaat lainnya yang menjadi penting dengan adanya proyek transportasi adalah penghematan waktu bagi penumpang dan barang. Bagi penumpang, penghemata waktu dapat dikaitkan dengan banyaknya pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh penumpang tersebut. Untuk menghitungnya dapat dihitung dengan jumlah penumpang yang berpergian untuk satu usaha jasa saja; dan dapat pula dihitung dengan tambahan waktu senggang atau produksi yang timbul apabila semua penumpang dapat mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat. Adapun manfaat dari penghematan waktu tersebut dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan waktu tempuh dengan rata-rata pendapatan per jam dari jumlah pekerja yang menggunakan fasilitas tersebut. Manfaat penghematan waktu untuk barang terutama dilihat pada barang-barang yang cepat turun nilainya jika tidak segera sampai di pasar, seperti sayur- sayuran, buah-buahan dan ikan. Manfaat lain akibat adanya penghematan waktu tempuh adalah biaya modal (modal atas modal kerja) sehubungan dengan pengadaan persediaan.

- Pengurangan kecelakaan

Untuk proyek-proyek tertentu, pengurangan kecelakaan merupakan suatu manfaat yang nyata dari keberadaan transportasi. Seperti perbaikan-perbaikan sarana transportasi pelayaran, jalan kereta api dan sebagainya telah dapat mengurangi kecelakaan. Namun di Indonesia, masalah ini masih banyak belum mendapat perhatian, sehingga sulit memperkirakan besarnya manfaat karena pengurangan biaya kecelakaan. Jika kecelakaan meningkat dengan adanya peningkatan sarana dan pra sarana transportasi, hal ini menjadi tambahan biaya atau bernilai manfaat negatif.

- Manfaat akibat perkembangan ekonomi

Pada umumnya kegiatan transportasi akan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi suatu daerah. Besarnya manfaat ini sangat bergantung pada elastisitas produksi terhadap biaya angkutan. Tambahan output dari kegiatan produksi tersebut dengan adanya jalan dikurangi dengan nilai

sarana produksi merupakan benefit dari proyek tersebut.

- Manfaat tidak langsung.

Merupakan manfaat yang didapat karena terhubungnya suatu daerah dengan daerah lain melalui jalur transportasi. Selain manfaat karena terintegrasinya dua daerah tersebut, maka akan terjadi pemerataan pendapatan dan prestise, sehingga manfaat ini sangat sulit untuk diperhitungkan secara kuantitatif.

### 2.3. Pemanfaatan transportasi Publik

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus memenuhi kriteria pelayanan publik. Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan.

Ketentuan pertama adalah kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang yang menggunakan jasa transportasi. Penumpang akan merasa nyaman di dalam sarana transportasi bila di sarana tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, dan proses yang dijalani calon penumpang sebelum dan setelah berada dalam sarana transportasi.

Ketentuan kedua adalah keamanan, yaitu aspek rasa aman yang dirasakan oleh penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya adalah sistem tertutup dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan penumpang. Pada kasus boat pancung, termasuk di dalamnya adalah terminal yang hanya diakses oleh penumpang yang sudah membeli tiket boat pancung. Selain itu, adalah sistem naik dan turun penumpang. Untuk menjaga keamanan, penumpang harus naik dan turun hanya pada pelabuhan yang telah ditetapkan, dan penumpang tidak dapat naik dan turun pada tempat selain pelabuhan resmi. Dengan demikian, sistem tertutup ini dapat memberikan rasa aman bagi penumpang dari ancaman pencurian, pencopetan, perampokan, atau insiden insiden lainnya yang mengancam keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa transportasi.

Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan terpenuhinya waktu sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan atau tepat. Ketentuan ini

hanya dapat terpenuhi bila sarana transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus, Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa sarana transportasi massal yang dapat memenuhi ketiga ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui konsep transportasi yang terencana dengan baik. Sarana transportasi ini, walaupun belum sempurna yang diharapkan pada ketiga Analisis faktor ketentuan di atas, namun telah memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi publik yang cepat, nyaman dan aman.

**Tabel 1 Indikator sistem transportasi**

Aman	Bersih, tertib, dan biaya terjangkau secara ekonomi
Nyaman	Rendahnya tingkat kriminal di pelabuhan di jalan, berkurangnya resiko kecelakaan, dan adanya sistem tertutup dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan penumpang
Pelayanan prima	Tepat waktu dan banyaknya masyarakat yang menggunakannya
Ramah lingkungan	Berkurangnya polusi udara, bertambahnya trayek, dan moda transportasi yang layak

#### 2.4. Peranan Boat Pancung

Keberadaan sarana transportasi baik transportasi darat maupun air memberikan banyak peranan bagi masyarakat di wilayah tersebut, sebagai sarana transportasi laut untuk wilayah pulau Buluh dan sekitarnya transportasi Boat Pancung memberikan peranan sebagai berikut:

- a) Menghubungkan wilayah Pulau Belakang Padang dan daerah sekitarnya. Dalam aspek ekonomi transportasi Boat Pancung berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar.
- b) Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Penyebaran ekonomi yang tidak merata dengan bantuan dari pada transportasi Boat Pancung akan merangsang pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang tidak berkembang atau konsep transport promote the trade dan sebagai sarana penunjang perkembangan bagi daerah-daerah yang telah berkembang atau konsep transport follow the trade.
- c) Sarana Aksesibilitas Lokasi geografis yang dikelilingi oleh perairan membuat

hubungan masyarakat antar pulau menjadi lebih renggang. Peranan transportasi Boat Pancung dalam hal ini adalah sebagai sarana aksesibilitas bagi masyarakat yang memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat Pulau Belakang Padang dengan pulau lainnya, baik itu dari segi pendidikan, perdagangan maupun kesehatan.

Jasa Transportasi Boat Pancung merupakan salah satu sarana transportasi yang ada di Pulau Belakang Padang. Masyarakat pulau sebelum mengenal transportasi Boat Pancung seperti sekarang telah lebih dahulu menggunakan angkutan laut yang disebut dengan pompong. Tahun 1990-an perekonomian masyarakat Pulau Belakang Padang mulai meningkat dikarenakan pada waktu itu Kota Batam belum sepadat sekarang. Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata dan pusat perdagangan di wilayah Kota Batam selain dari Kecamatan Belakang Padang. Hal ini juga berdampak pada perekonomian, satu demi satu Boat Pancung dimiliki oleh beberapa masyarakat Pulau Belakang Padang, sampai akhirnya tahun 1990 awal muncul Boat Pancung mulai sering dikomersilkan sebagai tempat mencari uang sebagai angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Sekupang - Kota Batam ke Pulau Belakang Padang dan beberapa pulau disekitarnya. Tahun 2011 mulai terdapat pelonjakan pertumbuhan jasa transportasi Boat Pancung. Kenaikan ini tidak lain disebabkan kebutuhan masyarakat Pulau Belakang Padang akan moda transportasi. Tahun 2000 pengelola jasa transportasi Boat Pancung mulai berbenah. Transportasi Boat Pancung mulai mempertimbangan keselamatan para penumpangnya. Boat Pancung dilengkapi dengan perlengkapan pengaman seperti pelampung dan pruit dan Jasa Raharja. Selain itu juga pengelola jasa transportasi Boat Pancung sudah berbenah, setidaknya perbaikan akan pelabuhan-pelabuhan untuk persinggahan sudah lebih aman dibanding tahun sebelumnya. Pengadaan kursi tunggu dan penyediaan Televisi sebagai sarana hiburan membuat kelengkapan dermaga yang terletak di Pelabuhan domestik.

#### a. Kerangka Good Governance

*Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui

interaksi antarmasyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan - perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan pendapatan, sedangkan masyarakat madani (civil society) menyelenggarakan interaksi sosial dalam politik secara sehat. Pendek kata, esensi dari paradigma ini adalah memperkuat interaksi antara ketiga aktor tersebut dalam mempromosikan *people-centered development* (Cheema, 2007 : 34-35).

Aktor-aktor *Good Governance* menurut *World Conference on Governance*, UNDP (1999) (dalam Sedarmayanti, 2009: 278) antara lain :

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan- kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengelolaan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

*Good Governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor diatas.

Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk dipusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada dimasyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swastapun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2013: 282) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu :

- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
- b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberi kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni dan kerjasama untuk pertumbuhan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Lima karakteristik *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip *good governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi



hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Dewasa ini, governance mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP dengan menggunakan istilah “good governance”. Adapun karakteristik good governance dari UNDP (dalam Keban 2014 : 38-39) meliputi :

1. *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam mengambil keputusan baik langsung atau melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law* yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia.
3. *Transparency* yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat diakses oleh semua orang yang berkepentingan.
4. *Responsiveness* yaitu bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.
5. *Consensus orientation* yaitu bahwa harus ada proses mediasi untuk sampai kepada consensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
6. *Equity* yaitu bahwa semua orang (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. *Effectiveness and efficiency* yaitu bahwa proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik (*best use*) terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada.
8. *Accountability* yaitu bahwa para pengambil keputusan di instansi pemerintah, sector publik dan organisasi masyarakat madani (*civil society*) harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada pemangku kepentingan.
9. *Strategic vision* yaitu bahwa para pemimpin

dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latarbelakang sejarah, dan kompleksitas sosial dan budaya.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hanya memaparkan dari hasil wawancara secara ilmiah dan suatu gejala-gejala yang ada dengan apa adanya pada saat sekarang. Menurut Sugiyono (2007 : 15) bahwa “data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran.” Dari data yang telah terkumpul sesuai dengan indikator permasalahan peneliti mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur sehingga mempunyai makna sesuai permasalahan yang berkaitan dengan Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Pulau Belakang Padang Batam Dalam Kerangka *Good Governance*.

#### 3.1. HASIL PENELITIAN

##### 3.1.1 Analisis Data Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Belakang Padang Kota Batam Dalam Kerangka *Good Governance*

Hasil wawancara peneliti oleh responden dengan melihat pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang Padang dalam kerangka governance. *Good governance* sektor publik merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangman, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut Prinsip Responsivitas pemerintah, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi sarana transportasi laut di Pulau Belakang Padang Kota Batam. *Good governance* digerakan oleh tiga domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat).

##### 3.1.2 Pemerintah (Dishub dan Disdik Kota Batam)

Transportasi Laut di Pulau Belakang Padang merupakan sarana transportasi yang

memudahkan mereka berpergian, Oleh karena itu, peran dan respon pemerintah sangat diharapkan dalam menerapkan prinsip responsivitas atau daya tanggap terhadap kebutuhan publik bagi masyarakat. membangun *Good Governance*, bukan hanya masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, kondisi pelaku dalam masyarakat juga harus mendapat perhatian. Dalam pencapaian pemerintahan yang baik interkasi dari masyarakat juga dibutuhkan karena dalam perencanaan strategis pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. oleh karena itu, prinsip partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam *Good Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat mengenai bantuan biaya transportasi siswa Pulau Belakang Padang yang menyeberang memang sudah mendapat respon dari pemerintah kota Batam, namun pada kenyataannya bantuan tersebut sering terkendala saat pencairan dana. Menurut tokoh masyarakat Pulau Belakang Padang selama ini memang masyarakat belum pernah mengajukan permohonan bantuan secara resmi kepada pihak pemerintah dikarenakan banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan hal itu karena mereka takut mata pencarian mereka terganggu padahal harapan dari masyarakat memang sangat ingin transportasi laut yang lebih layak sehingga perjalanan mereka aman dan nyaman, sehingga menjamin keselamatan mereka ketika berpergian.

### 3.1.3. Pihak Swasta (Pemilik transportasi laut)

Transportasi masyarakat Pulau Belakang Padang dikelola oleh pihak swasta, terbentuknya transportasi tersebut berawal dari keinginan masyarakat untuk berpergian dan memenuhi aktivitas ekonomi dan pendidikannya. Dalam penelitian ini peneliti melihat dari prinsip Efektivitas dan Efisiensi sarana transportasi yang dimiliki pihak swasta tersebut sehingga bisa melihat interaksi dari 3 domain (kerangka) yang berinteraksi dalam *Good Governance*.

### 3.1.4 Karakteristik Kepemerintahan yang Baik Dalam Penyediaan Transportasi Laut di Pulau Belakang Padang sebagai penunjang pariwisata daerah dalam kerangka good governance

Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP (1997) (dalam Sedarmayanti 2013: 282) mengidentifikasi lima karakteristik:

1. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar : pemerintah (dishub Kota Batam, disdik Kota Batam), sektor swasta (pemilik transportasi laut di Pulau panjang), dan masyarakat madani (masyarakat Pulau Belakang Padang /penumpang transportasi laut). ketiga aktor tersebut terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang Padang, dishub Kota Batam memberikan bantuan berupa penyediaan alat-alat keselamatan penumpang seperti pelampung keselamatan dan disdik Kota Batam menyalurkan dana dari Pemko Batam untuk diberikan bantuan biaya transportasi laut siswa hinterland termasuk siswa Pulau Belakang Padang yang menyeberang untuk pergi kesekolah, pihak swasta menyediakan sarana transportasi laut di Pulau Belakang Padang karena permintaan masyarakat Pulau Belakang Padang, dan masyarakat sebagai aktor yang berkepentingan yang menggunakan jasa transportasi laut tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan interaksi ketiga aktor tersebut belum cukup maksimal
2. Komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan komunikasi dari ketiga aktor yang terlibat dalam transportasi laut di Pulau Belakang Padang masih rendah karena pihak penyedia transportasi dan masyarakat tidak menyampaikan ke pihak pemerintah akan kebutuhan transportasi masyarakat yang lebih layak serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah sehingga komunikasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya/kurangnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang menyediakan transportasi laut di Pulau Belakang Padang.
3. Proses penguatan sendiri. Transportasi laut di Pulau Belakang Padang terbentuk karena kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang memudahkan mereka berpergian dan beraktivitas.
4. Teknologi transportasi laut di Pulau Belakang Padang belum mengikuti perkembangan zaman . Seharusnya sekarang sudah ada teknologi khusus kapal pengangkut penumpang sesuai standar kelayakan kapal yang menjamin

kenyamanan dan keamanan penumpang.

5. Masyarakat Pulau Belakang Padang sangat bergantung dengan pihak penyedia jasa transportasi karena jika tidak ada transportasi laut disana sangat menghambat kehidupan mereka karena menyulitkan masyarakat untuk berpergian serta memperoleh pendidikan. Hal ini menyebabkan saling ketergantungan antara pemerintah, pihak swasta pemilik transportasi, dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi tersebut.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Belakang Padang Kota Batam berjalan lancar karena adanya interaksi dari masyarakat, pihak swasta dan pemerintah berdasarkan kerangka *Good Governane*.

###### 4.1.1. Pemerintah

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dimana pemerintah sudah merespon atau membantu penyediaan alat-alat keselamatan transportasi seperti pelampung keselamatan, walaupun jumlah pelampung itu kurang dari jumlah penumpang, setidaknya dalam hal ini pemerintah sudah membantu dalam hal keselamatan penumpang transportasi laut bagi masyarakat Pulau Belakang Padang. Dinas Pendidikan Kota Batam juga ikut memberikan bantuan biaya transportasi kepada siswa hinterland termasuk siswa dari Pulau Belakang Padang. Walaupun biaya tersebut hanya diberikan sebagian siswa Pulau Belakang Padang saja, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga sangat terbantu mereka.

###### 4.1.2. Masyarakat

Tersedianya transportasi yang layak merupakan harapan mereka. Wujud *Good Governance* penyelenggaraan pemerintah daerah yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Interaksi dari ketiga pihak tersebut belum berjalan lancar karena melihat dari kondisi transportasi yang kurang layak sehingga mengancam keselamatan penumpang. Keberadaan transportasi boat pancung mempunyai peranan

penting bagi para pekerja swasta sebagai sarana transportasi mereka ketika pergi ke tempat kerja yang berlokasi di luar pulau, tanpa harus menyewa rumah atau kamar di luar pulau Buluh, serta dampaknya bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan keberadaan jasa transportasi Boat Pancung mempermudah mereka dalam distribusi barang maupun jasa

##### 4.1.3. Penyedia Transportasi Laut dalam Kerangka *Good Governance*.

- a. Interaksi, interaksi dari ketiga aktor yang terlibat belum cukup maksimal karena peran pemerintah terutama dishub masih kurang dan belum berjalan secara berkelanjutan
- b. Komunikasi, dilihat dari belum maksimalnya interaksi dari ketiga aktor yang terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang Padang hal ini disebabkan komunikasi dari ketiga aktor tersebut belum berjalan dengan baik.
- c. Pengawasan dari pihak pemerintah yang belum maksimal kemudian membuat kurang layaknya standar transportasi laut yang dimiliki oleh pihak swasta.
- d. Teknologi yang digunakan dalam penyediaan transportasi laut di Pulau Belakang Padang masih sangat sederhana sehingga belum sesuai dengan standar kelayakan kapal penyeberangan penumpang pada umumnya.

#### 4.2. SARAN

##### 4.2.1 Pemerintah

Pemerintah seharusnya mensurvei lokasi yang akan mereka bantu sehingga mengetahui kondisi tempat yang memerlukan bantuan dan apa saja yang mereka butuhkan serta mengawasi secara berkelanjutan pelayanan transportasi yang disediakan pihak swasta. Dalam hal transportasi laut di Pulau Belakang Padang diharapkan pihak pemerintah menambah pelampung keselamatan. Pemerintah juga seharusnya memeriksa kelengkapan surat izin pemilik boat pancung dan standar kelayakan boat pancung supaya mengetahui dengan jelas apakah transportasi tersebut layak untuk mengangkut masyarakat



sesuai dengan standar kelayakan kapal penyeberangan.

#### 4.2.2. Masyarakat

Partisipasi masyarakat diharapkan agar disampaikan ke pemerintah dengan melibatkan perangkat desa sebagai salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena pemerintahan yang baik terbentuk karena adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan atas hak-hak dan kebutuhan masyarakat tersebut. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat sebagai pengontrol terhadap jasa transportasi Boat Pancung, pengontrolan yang kurang akan mengakibatkan kenaikan harga yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja dan merugikan pihak pelanggan tanpa harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing pelanggan.

#### 4.2.3. Pihak Swasta (Pemilik Transportasi)

Demi keselamatan dan kenyamanan penumpang pemilik kapal seharusnya memperbaiki kondisi kapal yang kurang layak. Diharapkan pemilik transportasi memikirkan lagi keselamatan penumpangnya karena sangat berbahaya membawa penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas pompong apalagi disaat angin kencang. Jika pihak swasta tidak mampu menyediakan transportasi yang lebih layak seharusnya mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah yang merupakan salah satu Lembaga yang terlibat dalam memenuhi pelayanan transportasi publik.

- [4] Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim, Abas. 2006. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Refika
- [6] Raja Grafindo Persada Serdamayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika
- [7] Aditama. Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Mole, Elsi.
2016. *Kualitas Pelayanan Publik (Studi kasus Pelayanan di Unit Usaha Transportasi Laut PD.Panca Karya Ambon)*
- [9] Putra, Andi Anggara Pratama. 2014. *Pelayanan Transportasi Laut di Pelabuhan Penyeberangan Pammatata Kabupaten Kepulauan Selayar*.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, Setio. 2015. *Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Kapal Penumpang Trayek Gresik-Bawean di Pelabuhan Gresik)*.
- [2] Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [3] Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.